

Resiliensi Pendidikan Islam dalam Konteks Minoritas: Strategi dan Dampak Sosial di Nusa Tenggara Timur

Syaban Abdul Karim

Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, Indonesia

email: syabanabdulkarim@uinmataram.ac.id

Abstrak: Studi ini menginvestigasi implementasi dan pengembangan pendidikan Islam di Nusa Tenggara Timur (NTT), sebuah wilayah dengan demografi mayoritas non-Muslim. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi adaptasi lembaga pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan defisit tenaga pengajar kompeten. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pendidikan Islam di NTT bertumpu pada dua strategi utama. *Pertama*, strategi internal yang meliputi pembangunan fisik dan non-fisik, manajemen keuangan yang akuntabel, serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). *Kedua*, strategi eksternal yang difokuskan pada penguatan "jaringan organik" (integrasi teknologi informasi/internet) dan "jaringan non-organik" (optimalisasi hubungan masyarakat dan *stakeholder*). Studi ini menyimpulkan bahwa strategi tersebut tidak hanya meningkatkan mutu pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator harmoni sosial dan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Daerah Minoritas, Manajemen Strategis, Jaringan Organik, Harmoni Sosial, NTT.

Abstract: This study investigates the implementation and development of Islamic education in East Nusa Tenggara (NTT), a region characterised by a non-Muslim majority demographic. The research aims to analyse the adaptation strategies employed by Islamic educational institutions in navigating geographical challenges, infrastructural limitations, and a deficit of competent teaching staff. Utilising a qualitative approach, data were collected through observation, documentation, and in-depth interviews. The findings reveal that the development of Islamic education in NTT relies on two primary strategies. *Firstly*, internal strategies comprise physical and non-physical development, accountable financial management, and the enhancement of Human Resource (HR) competence. *Secondly*, external strategies focus on strengthening "organic networks" (integration of information technology/internet) and "non-organic



networks" (optimisation of community relations and stakeholders). The study concludes that these strategies not only improve educational quality but also serve as catalysts for social cohesion and community empowerment in border regions.

Keywords: Islamic Education, Minority Context, Strategic Management, Organic Networks, Social Harmony, NTT.

How to Cite: Karim, Sy. A. (2025). Resiliensi Pendidikan Islam dalam Konteks Minoritas: Strategi dan Dampak Sosial di Nusa Tenggara Timur. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, vol. 19(1), 75-99. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v19i1.14594>.

Pendahuluan

Pendidikan Islam di Indonesia telah ada sejak masuknya Islam ke Indonesia yang berjalan seiring dengan berkembangnya Islam itu sendiri (Daulay, 2019). Hanya saja dalam hal ini, pendidikan Islam belum melembaga. Pendidikan Islam baru mulai melembaga ketika mulai ada pondok pesantren misalnya seperti yang terjadi berkembang di Jawa, Sumatera dan beberapa daerah lainnya. Sebagaimana diketahui pesantren pertama yang dibangun di Indonesia adalah Ponpes Sidogiri yang didirikan oleh Sayyid Sulaiman Basyaiban dari Cirebon pada tahun 1745 (Fitri & Ondeng, 2022), dari sinilah model pembelajaran berganti dari sistem sorogan menjadi sistem klasikal (formal), itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya lembaga pendidikan formal (Ishom El-Saha & Matsuki, 2004). Berbeda dengan fenomena yang terjadi di Jawa, Sumatera, maupun Kalimantan, sedangkan di wilayah Nusa Tenggara Timur keberadaan lembaga pendidikan Islam justru dimulai bukan dari pesantren tetapi dari madrasah yang didirikan hasil swadaya masyarakat kemudian membentuk yayasan dan berkembang menjadi pesantren (Syarif, 2021).

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keragaman budaya, agama, dan etnis yang sangat kaya. Meskipun mayoritas penduduk di NTT beragama Kristen, keberadaan komunitas Muslim tetap signifikan dan berperan dalam kehidupan sosial serta

budaya masyarakat (Tule et al., 2015). Di tengah keragaman ini, pendidikan Islam memainkan peran penting dalam pembentukan identitas keagamaan dan moralitas bagi umat Islam di NTT (Syarif, 2021). Pendidikan Islam di NTT menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, terutama karena berada di daerah dengan mayoritas non-Muslim. Tantangan-tantangan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya tenaga pengajar yang kompeten, serta kebijakan pemerintah yang mungkin belum sepenuhnya mendukung pengembangan pendidikan Islam secara optimal. Di sisi lain, pendidikan Islam di NTT juga memiliki peluang untuk berkembang dengan baik melalui pendekatan yang inklusif dan adaptif terhadap konteks sosial-budaya setempat (Syarif, 2021).

Gerakan modernisasi yang dipengaruhi semangat Pan-Islamisme Timur Tengah, yang dibawa oleh para intelektual muda Muslim, sebut misalnya KH. Hasyim Asy'ari (Pendiri Nahdhatul Ulama) dan KH. Muhammad Dahlan, Pendiri Muhammadiyah, Syekh Achmad Chatib dari Minangkabau dan Syekh al- (pendiri Banjari dari Banjarmasin) (Khuluq, 2013), memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia yang nantinya berpengaruh hingga ke daerah timur.

Oleh karena itu, kehadiran organisasi keagamaan Islam, yakni Yayasan Tarbiyatul Al-Islamiyah, di NTT dengan visinya bergerak dalam bidang pendidikan dan dakwah mengisyaratkan keberadaan minoritas. Muslim semakin menguat dengan adanya ekspansi pengembangan pendidikan Islam diberbagai daerah yang ada Kabupaten Flores Timur termasuk Kabupaten Lembata sebelum terlepas dari Kabupaten Flores Timur. Seiring dengan kemajuan zaman dan bertambahnya penduduk akan memberikan implikasi animo masyarakat terhadap pendidikan Islam semakin progres untuk menentukan pilihan-pilihan untuk menyekolahkan putra-putrinya.

Dengan kondisi dan eksistensi pendidikan Islam tersebut, kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memainkan peran kunci dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan Islam di NTT. Kebijakan-

kebijakan ini mencakup aspek-aspek seperti kurikulum, distribusi sumber daya, dan dukungan terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam. Namun, implementasi kebijakan tersebut seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi teknis maupun sosial, yang dapat mempengaruhi efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat lokal (Makbuloh, 2012).

Beberapa penelitian telah dilakukan yang semirip dengan penelitian ini, namun dengan pendekatan, sudut pandang, metodologi hingga teori yang berbeda. Di antaranya penelitian oleh Deden Makbuloh (2012), yang menyatakan bahwa kaum minoritas sepanjang jalan hidupnya berhadapan dengan problematika kekuasaan. Kemudian, penelitian oleh Bustanul Arifin (2019), yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan Islam pesantren, madrasah maupun sekolah Islam didorong untuk terus progres, bertransformasi dan adaptif terhadap setiap perubahan zaman agar tidak tertinggal. Penelitian Rabiatul Adawiyah dan Wan Jamaluddin (2016) menunjukkan bahwa pesantren senantiasa dibekali berbagai pengetahuan dan pengalaman belajar sebagai modal dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan pengembangan pendidikan Islam di NTT, dengan fokus pada bagaimana strategi pendidikan Islam diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Islam di daerah yang pluralistik seperti NTT, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan pendidikan Islam yang lebih inklusif dan efektif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2011), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang dapat diamati. Metode ini dilandaskan pada falsafah postpositivisme, di mana peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dan menggunakan analisis data bersifat induktif (Sugiyono, 2011). Data yang diperoleh lebih mengutamakan makna dan pemahaman yang mendalam dari fenomena yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan (Arikunto, 2006). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan narasumber (Lofland & Moleong, 2002).

Pembahasan

Nusa Tenggara Timur (NTT) merepresentasikan wajah kemajemukan Indonesia melalui koeksistensi harmonis antarumat beragama. Dalam lanskap demografis di mana umat Islam merupakan minoritas, pengembangan pendidikan Islam menuntut pendekatan strategi yang inklusif, adaptif, dan kontekstual. Hal ini krusial agar lembaga pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai benteng teologis, tetapi juga memberikan dampak sosial positif yang signifikan bagi masyarakat Muslim maupun masyarakat luas.

Secara historis, institusi pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren telah lama mengakar sebagai basis pembinaan umat yang diinisiasi oleh tokoh agama setempat. Namun, akselerasi kualitas pendidikan di wilayah ini menghadapi tantangan struktural yang kompleks, meliputi isolasi geografis, keterbatasan ekonomi, serta defisit kualitas sumber daya manusia (SDM). Realitas ini berkorelasi langsung dengan indeks pendidikan NTT yang relatif tertinggal dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Padahal, kualitas SDM merupakan determinan utama dalam kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam, melakukan inovasi, dan meningkatkan taraf hidup, khususnya di kawasan perbatasan yang kerap terpinggirkan dari akses pembangunan.

Dalam konteks pembangunan, pendidikan merupakan pilar fundamental. Maulana (sebagaimana dikutip dalam Kennedy, 2022) menegaskan bahwa arah pembangunan harus berorientasi pada perluasan kesempatan memperoleh pendidikan unggul yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, serta peningkatan relevansi pelatihan dengan dinamika dunia usaha. Meskipun pemerintah daerah telah meningkatkan investasi infrastruktur—melalui penambahan ruang kelas, laboratorium, sekolah kejuruan, hingga perguruan tinggi—data menunjukkan bahwa rata-rata peringkat pendidikan di NTT masih berada pada posisi keempat terendah secara nasional (Bappenas, 2017). Kesenjangan antara investasi fisik dan *output* pendidikan ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi pengembangan yang diterapkan.

Madrasah Dalam Lintas Sejarah NTT

Perkembangan madrasah di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak terlepas dari inisiatif tokoh dan organisasi Islam, salah satunya Yayasan Tarbiyah Islamiyah. Yayasan ini berperan sentral dalam mengonsolidasi sekolah-sekolah lokal yang sebelumnya tidak tertata agar dapat berkembang secara institusional. Model pengembangan ini kemudian diadopsi oleh ormas lain, seperti Yayasan Hidayatullah dan kelompok dakwah Salafi, yang turut mengakuisisi dan mengembangkan berbagai lembaga pendidikan menjadi berbasis Islam¹.

Data lapangan menunjukkan pertumbuhan institusi pendidikan Islam yang signifikan, mulai dari tingkat Tsanawiyah hingga perguruan tinggi. Mantan Kepala Bagian Tata Usaha Kemenag Provinsi NTT, Pahlawan Mukin, menegaskan bahwa tren pertumbuhan madrasah dan pesantren tidak hanya terpusat di Kota Kupang, tetapi juga meluas secara signifikan ke wilayah Alor, Flores Timur, Maumere, Ende, Sumba, hingga kawasan Manggarai Raya (P. Mukin, komunikasi pribadi, 29 Desember 2022).

Tabel 1. Keadaan Madrasah Se-NTT

No	Nama Madrasah	Negeri	Swasta	Jumlah
1	RA (Raudhatul Athfal)	-	133	133
2	MI (Madrasah Ibtidaiyah)	34	143	177
3	MTs (Madrasah Tsanawiyah)	24	76	100
4	MA (Madrasah Aliyah)	12	37	49
5	Diniyah Takmiliah	1.473*	1.472*	2.945
6	TPA/Taman Pendidikan Qur'an	-	520	520

*Catatan: Data Diniyah Takmiliah pada tabel asli merujuk pada jumlah santri laki-laki dan perempuan, bukan jumlah lembaga.

Berdasarkan Tabel 1.1, lembaga pendidikan formal (RA, MI, MTs, MA) di NTT didominasi oleh status swasta. Namun, distribusi lembaga ini belum merata sepenuhnya. Kabupaten Sabu Rajua dan Malaka tercatat belum memiliki jenjang pendidikan formal Islam (MI, MTs, dan MA) maupun Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

Kuantitas madrasah ini menjadi indikator konkret eksistensi dan perkembangan pendidikan Islam di NTT. Tren positif ini diprediksi akan berlanjut seiring kemajuan teknologi dan kontribusi generasi muda NTT yang menempuh pendidikan di luar daerah. Untuk menjaga momentum ini, diperlukan sinergi antara dukungan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat dalam menyekolahkan anak di madrasah, serta ketersediaan tenaga pendidik yang berkualitas dan militan.

Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Di NTT

Strategi Internal

Strategi internal dapat sangat penting untuk dilakukan dalam mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Strategi Internal dimaksudkan adalah konstruksi pemikiran atau kompromi pemikiran yang progres dibangun oleh masyarakat sekolah baik kepala sekolah, tenaga pengajar maupun tenaga kependidikan dalam hajatan pengembangan lembaga pendidikan lebih maju dan modern. Untuk itu ada beberapa hal menjadi pertimbangan segera dilakukan oleh pengambilan keputusan antara lain:

Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik dalam konteks pendidikan diartikan sebagai upaya pengadaan, pemeliharaan, dan renovasi infrastruktur sekolah, baik yang mengalami kerusakan ringan maupun berat. Namun, dalam perspektif yang lebih luas, pembangunan fisik juga mencakup aksesibilitas geografis dan ketersediaan sumber daya alam (SDA). Sebagaimana dijelaskan oleh B.S (dalam Rachmawati et al., 2018), pembangunan infrastruktur pemerintah—seperti jalan dan jembatan—serta potensi SDA yang memadai di suatu wilayah akan sangat menentukan percepatan pembangunan dan mobilitas sosial-budaya masyarakat setempat.

Dalam lingkup satuan pendidikan, Muhidin (komunikasi pribadi, 21 Desember 2022) menegaskan bahwa diskursus pembangunan fisik tidak hanya terbatas pada gedung permanen, tetapi juga mencakup infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang fleksibel, terutama dalam kondisi darurat. Hal ini sejalan dengan pandangan Gunawan (2016) bahwa kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan berkorelasi positif dengan kesuksesan Proses Belajar Mengajar (PBM). Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan aset fisik pendidikan sebagai bentuk investasi negara.

Manajemen sarana dan prasarana menjadi kunci dalam optimalisasi fasilitas fisik tersebut. Suharsimi Arikunto (dalam Sinta, 2019) mendefinisikan manajemen ini sebagai pengelolaan seluruh perangkat alat dan bahan—mulai dari gedung, ruang kelas, laboratorium, hingga perabot sekolah—agar kegiatan belajar berjalan efektif. Sa'adiyah (2018) menambahkan bahwa sebagai wadah strategis pencetak generasi bangsa, lembaga pendidikan wajib menjamin mutu layanan melalui fasilitas yang memadai. Manajemen yang baik bertujuan mempersiapkan dan mengatur segala peralatan untuk kelancaran proses pendidikan (Rouf, 2023).

Selain infrastruktur, peran kepemimpinan kepala sekolah sangat strategis dalam manajemen fisik ini. Kepala sekolah berfungsi sebagai lokomotif dan figur sentral yang menentukan arah kebijakan lembaga (Sanjana, 2018).

Rosyandi et al. (2015) menekankan bahwa kepala sekolah harus mampu membangun kultur sekolah yang mencerahkan. Hal ini dikonfirmasi oleh Nona Rahmat, seorang pendidik di SMA Muhammadiyah, yang mengungkapkan bahwa arahan pimpinan untuk memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana seoptimal mungkin sangat krusial dalam memenangkan persaingan kualitas dengan sekolah lain, baik negeri maupun swasta (komunikasi pribadi, 21 Desember 2022).

Secara keseluruhan, pembangunan fisik bukan sekadar pengadaan gedung, melainkan sebuah keharusan strategis yang harus diperjuangkan dan dikelola secara profesional untuk mendukung aktivitas pembelajaran yang berkualitas.

Pembangunan Non-Fisik

Pembangunan non-fisik mengacu pada pengembangan aspek manusia, termasuk sosial budaya, politik, dan religius. Dalam konteks sosial budaya, secara sempit, hal ini mencakup adat istiadat dan kebiasaan yang masih dijaga dan diterima oleh masyarakat. Salah satu contoh yang mencerminkan kekuatan sosial budaya ini adalah kegiatan gotong royong, yang mengedepankan kerja sama dan saling pengertian dalam upaya membangun dan memproduksi.

M. Idris (2015: 12) menyatakan bahwa:

“Bagi masyarakat NTT, tradisi kearifan lokal tentang gotong royong merupakan warisan leluhur yang hingga kini masih kental dan membumi. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong dapat dilihat dalam berbagai bentuk partisipasi, seperti saat membangun perahu, pembuatan kubur, perayaan perkawinan, dan sambung tangan (hode limak) dalam hal kematian, dan sebagainya.”

Baik pembangunan fisik maupun non-fisik pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat luas, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan oleh pengambil keputusan terkait pembangunan non-fisik, di antaranya adalah: (1) Komitmen pemimpin untuk bekerja dan berkorban; (2) Perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten.

E. Mulyasa (2013) membagi kompetensi seorang pendidik ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) kompetensi pribadi, (2) kompetensi profesional, dan (3) kompetensi kemasyarakatan atau sosial.

Dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi pribadi menjadi sorotan utama dalam masyarakat, terutama terkait dengan kehadiran dan peran guru. Hal ini terlihat dari adanya kekhawatiran masyarakat mengenai perilaku sebagian guru. Seperti yang ditegaskan oleh Ibrahim Kadir (2017: 45):

“Banyak informasi yang tersebar melalui media sosial mengenai sebagian guru yang melakukan pelecehan seksual terhadap siswa, terutama ketika ada kegiatan ekstrakurikuler, seperti pelatihan komputer atau pembinaan olahraga. Kesempatan ini sering dimanfaatkan oleh guru yang tidak bertanggung jawab. Faktor pemicunya adalah kurangnya pengawasan dari atasan atau pimpinan lembaga. Oleh karena itu, pihak sekolah atau pimpinan lembaga harus memperketat pengawasan dengan melibatkan guru lain dalam proses ini.”

Mengamati kompetensi profesional guru di berbagai sekolah, tampaknya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Nona Rahma (2020: 89) menegaskan:

“Perbedaan ini memacu setiap individu untuk terus mengelola dan mengembangkan diri. Dengan kata lain, guru tidak boleh berhenti mengasah daya nalar dan akalunya untuk meningkatkan wawasan melalui literasi yang intens. Hal ini penting agar guru dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dunia yang begitu pesat. Jika tidak, banyak hal yang akan tertinggal, termasuk informasi terkait pendidikan atau IPTEK.”

Kompetensi kemasyarakatan atau sosial terus diperkuat sebagai bentuk keterhubungan antara individu, masyarakat umum, dan komunitas sekolah (guru dan siswa). Wina Sanjana (2018) dalam Akhyak menjelaskan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi mencakup tiga hal: (1) kompetensi dalam perencanaan pembelajaran, (2) kompetensi dalam proses atau implementasi pembelajaran, dan (3) kompetensi dalam evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, guru harus mempersiapkan diri dari segi

kemampuan, mentalitas, serta perangkat pendukung kegiatan belajar, seperti silabus atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Dalam hal ini, guru dapat merancang proses pembelajaran sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan siswa.

Muhibbin Syah (2016) menyatakan bahwa dalam menjalankan kewenangan profesionalnya, guru dituntut memiliki beragam kecakapan psikologis, yang meliputi: (1) kompetensi kognitif (kecakapan dalam aspek rasa cipta), (2) kompetensi afektif (kecakapan dalam ranah rasa), dan (3) kompetensi psikomotorik (kecakapan dalam ranah karsa).

Sementara itu, Uzer Usman (2014) juga mengemukakan bahwa pendidik harus memiliki kompetensi dalam dua aspek utama, yaitu kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional. Dari kedua pemikiran ini, peneliti menilai bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan, meskipun Muhibbin Syah memberikan penjelasan yang lebih singkat dan padat, sementara Uzer Usman memberikan penjelasan yang lebih luas dan rinci.

Hamruni (2015) menguraikan dengan lebih terperinci tentang kompetensi pendidik dalam konteks pendidikan Islam, yang meliputi: a. Kompetensi personal religius, b. Kompetensi sosial religius, c. Kompetensi profesional religius, dan d. Kompetensi pedagogik religius.

Pengelolaan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan elemen vital yang tidak terpisahkan dari tata kelola organisasi pendidikan. Ketepatan dalam pengelolaan keuangan tidak hanya menjadi syarat mutlak peningkatan mutu, tetapi juga mencerminkan keseriusan dan keberlangsungan sebuah lembaga (Arvia et al., 2016). Tantangan utama yang dihadapi sekolah seringkali adalah menyeimbangkan antara keterbatasan anggaran dengan tuntutan biaya operasional yang tinggi, seperti gaji guru dan pengadaan sarana. Mulyasa (2005) menyoroti dilema ini, di mana terdapat tuntutan masyarakat akan

pendidikan murah namun berkualitas, padahal layanan pendidikan prima senantiasa membutuhkan dukungan biaya yang memadai.

Secara terminologis, manajemen keuangan melampaui sekadar aktivitas pembukuan administratif. Sulistiyorini (2006) dan Arwidayanto et al. (2017) mendefinisikan manajemen keuangan sebagai proses komprehensif yang dimulai dari perencanaan, penggalan sumber daya, pembukuan, pembelanjaan, hingga pengawasan dan pertanggungjawaban (pelaporan). Tujuannya adalah memastikan organisasi berjalan secara efektif dan efisien dalam memberikan layanan pendidikan (Mesiono et al., 2020). Aziz (2017) menambahkan bahwa proses manajerial ini harus didasari oleh ilmu dan keahlian untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam tataran praktis, aspek integritas pengelola menjadi sangat krusial. Simat H. Abdul Karim mengingatkan bahwa keuangan adalah isu yang sangat sensitif; tanpa pengelolaan yang taat asas dan petunjuk teknis, risiko penyimpangan dana akan meningkat (komunikasi pribadi, 14 Desember 2022). Oleh karena itu, transparansi dan keteraturan menjadi kunci.

Penerapan manajemen keuangan yang sehat mengikuti siklus *planning, organizing, actuating*, dan *controlling*. Untuk menjaga akuntabilitas, Najihan et al. (2021) menekankan perlunya pemisahan fungsi administrasi keuangan menjadi tiga, yaitu: (1) Otorisator: Pejabat yang berwenang mengambil tindakan yang mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran uang; (2) Ordonator: Pejabat yang berwenang menguji dan memerintahkan pembayaran (biasanya Kepala Sekolah); (3) Bendaharawan: Pejabat yang berwenang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang serta membuat pembukuan.

Pemisahan tugas ini sejalan dengan amanat Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik.

Penguatan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian integral dari ajaran Islam, yang sejak awal telah mengarahkan umat manusia untuk berupaya meningkatkan kualitas hidup, dimulai dengan pengembangan budaya kecerdasan. Pendidikan menjadi titik tolak utama dalam proses ini, yang bertujuan untuk mempersiapkan manusia sebagai individu yang bertanggung jawab sekaligus makhluk sosial yang memiliki rasa kebersamaan dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, yang dibalut dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Nilai-nilai ini dapat ditegakkan sehingga kenyamanan hidup lahir dan batin dapat dinikmati bersama.

Tujuan utama dari pendidikan adalah membentuk integritas pribadi yang sesuai dengan tujuan penciptaan manusia. Hasan Langgulung (2013) menjelaskan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk pribadi anak didik yang memiliki fitrah, roh, jasmani, kemauan yang bebas, dan akal. Potensi manusia, bahkan, lebih sempurna daripada potensi makhluk Allah lainnya, seperti yang tergambar dalam QS. Al-Ahzab: 72.

Dja'afar (2015) menjelaskan bahwa pendidikan Islam memberikan perhatian besar terhadap pengembangan SDM yang mencakup banyak aspek, baik fisik maupun non-fisik, seperti sikap mental, perilaku, kemampuan, intelegensi, agama, hukum, dan kesehatan. Semua aspek ini merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap individu, baik jasmani maupun rohani. Tidak dapat dipungkiri bahwa aspek jasmani selalu dipengaruhi oleh ruhaniah, yang bertindak sebagai pendorong dari dalam diri manusia.

Sonny Somarsono (2014) menjelaskan bahwa SDM mengandung dua pengertian. Pertama, SDM adalah usaha kerja sama atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Kedua, SDM merujuk pada manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha tersebut, yang berarti melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk penguatan SDM, setidaknya ada lima kemampuan yang harus dimiliki, yakni: (1) Kemampuan belajar, mendidik, dan melatih anak didik agar terbiasa dan terampil dalam proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pendidikan Islam hendaknya berlandaskan pada empat pilar pembelajaran abad ke-21, sebagaimana yang disarankan oleh UNESCO, yaitu: *Learning to think* (pelajaran untuk berpikir), *Learning to know* (pelajaran untuk mengetahui), *Learning to do* (pelajaran untuk melakukan), dan *Learning to live together* (pelajaran untuk hidup bersama). (2) Kemampuan melakukan penelitian eksploratif, kritis, inovatif, dan kreatif. (3) Kemampuan bekerja sama. (4) Kemampuan beradaptasi dengan keanekaragaman budaya. (5) Berpegang teguh pada nilai dan prinsip.

Selain itu, ada lima strategi lembaga pendidikan Islam dalam membangun SDM, antara lain: a. Optimalisasi peran lembaga pendidikan Islam, mulai dari sekolah wajib hingga perguruan tinggi, sebagai industri SDM unggul; b. Meng-upgrade kompetensi guru dan dosen dalam mendidik dan mengajar; c. Kompetensi penguasaan teknologi pembelajaran, serta media dan sumber belajar modern, untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan relevan.

Strategi Eksternal

Strategi eksternal yang dimaksudkan adalah konstruksi pemikiran strategis yang dibangun oleh masyarakat sekolah, pimpinan lembaga, dan tenaga administrasi dalam mencari alternatif terbaik untuk membangun relasi dengan masyarakat guna kemajuan dan pengembangan pendidikan yang lebih baik.

Pendidikan menjadi elemen yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan, baik yang bersifat informal, nonformal, maupun formal. Semua jenis pendidikan ini sangat dibutuhkan oleh setiap individu. Oleh karena itu, untuk menciptakan individu yang berkualitas, diperlukan pula pendidikan yang berkualitas.

Di Indonesia, permasalahan pendidikan masih menjadi tantangan yang belum teratasi. Masalah seperti rendahnya kualitas layanan pendidikan dasar dan tinggi, serta kemampuan baca tulis anak-anak, adalah contoh isu yang terus menjadi perhatian utama. Sayangnya, permasalahan ini sering dianggap sebagai hal yang biasa dan tidak menjadi fokus utama dalam masyarakat. Kerangka berpikir inilah yang menyebabkan pendidikan belum dapat menuju kemajuan yang signifikan. Seperti yang dikutip dalam laporan UNDP (2017), Indonesia menempati peringkat ke-116 dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan skor 0,694, jauh tertinggal dari Malaysia yang berada di peringkat ke-57 dengan skor 0,802. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum serius dalam menghadapi dunia pendidikan. Fakta ini sangat disayangkan, mengingat pendidikan adalah hal yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas bangsa.

Untuk mengembangkan lembaga pendidikan sesuai dengan cita-cita bangsa, penting untuk membangun jejaring hubungan antara lembaga sekolah dan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga pemerintah, masyarakat sekitar, serta pihak wali murid. Selain itu, penguatan dalam bidang teknologi informasi menjadi sangat krusial, mengingat perkembangan zaman yang semakin pesat dan digitalisasi yang telah merambah hampir semua aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, penguatan dalam bidang teknologi harus diprioritaskan, seiring dengan penguatan di bidang-bidang lainnya. Penguatan jaringan, baik secara organik maupun non-organik, menjadi langkah penting untuk diterapkan dalam upaya mengembangkan lembaga pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, jaringan dapat diartikan sebagai hubungan atau relasi kerja yang positif antara sekolah dan masyarakat. Secara lebih luas, jaringan ini dapat dipetakan menjadi dua bentuk, yakni jaringan organik berupa internet, dan jaringan non-organik berupa masyarakat, pemerintah, lembaga terkait, serta wali murid.

Penguatan Jaringan Organik

Integrasi teknologi informasi, khususnya internet, telah menjadi tulang punggung dalam sistem pendidikan modern. Secara historis, internet berevolusi dari jaringan terbatas ARPANET pada 1969 hingga menjadi *World Wide Web* (WWW) pada 1990 yang mengubah cara manusia mengakses informasi (CNBC Indonesia, 2022). Di Indonesia, penetrasi internet dimulai sekitar tahun 1994 melalui Paguyuban Network yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Onno W. Purbo. Kini, internet telah bertransformasi menjadi kebutuhan primer dengan jangkauan yang menembus batas geografis, menghubungkan ratusan juta pengguna global.

Dalam konteks pendidikan, internet bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen vital yang mendukung keberlangsungan proses belajar mengajar. Zulfitria et al. (2020) mencatat bahwa internet memfasilitasi akses terhadap sumber belajar digital yang tak terbatas, memungkinkan dosen, guru, dan siswa untuk memperkaya materi pembelajaran di luar batasan fisik ruang kelas. Hal ini mendesak institusi pendidikan untuk menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk tenaga teknis atau "operator sekolah" yang kompeten.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan tantangan tersendiri. Berdasarkan observasi, banyak sekolah yang kesulitan merekrut tenaga teknis berbasis IT murni. Muhajir, seorang pendidik di Adonara Timur, mengungkapkan bahwa seringkali guru diberikan tugas tambahan sebagai operator sekolah karena memiliki literasi komputer yang lebih baik dibandingkan staf lain. Peran ganda ini meliputi input data pokok pendidikan (Dapodik), pengelolaan administrasi digital, hingga menjadi jembatan komunikasi sekolah dengan pihak eksternal (komunikasi pribadi, 20 November 2022; 21 Desember 2022).

Pemanfaatan internet oleh siswa juga menunjukkan tren yang beragam. Zulfitria et al. (2020) mengidentifikasi beberapa pola perilaku siswa dalam mengakses internet, mulai dari pencarian referensi tugas, aktualisasi diri agar

tidak tertinggal informasi (*fear of missing out*), komunikasi interpersonal, hingga sekadar hiburan. Fenomena ini dikonfirmasi oleh Alam, yang menambahkan bahwa penggunaan gawai pribadi (HP) oleh siswa bagaikan dua mata pisau; di satu sisi mempermudah akses informasi edukatif, namun di sisi lain rentan disalahgunakan untuk konten non-edukatif jika tanpa pendampingan yang tepat (komunikasi pribadi, 3 Desember 2022).

Oleh karena itu, strategi penguatan jaringan organik di sekolah harus diarahkan pada literasi digital yang sistematis. Sekolah tidak hanya dituntut menyediakan akses (jaringan internet), tetapi juga membimbing siswa dalam pemanfaatan teknologi secara produktif. Langkah konkret yang dapat dilakukan meliputi pelatihan penggunaan surel (*email*) untuk pengiriman tugas, etika komunikasi digital, serta selektivitas dalam menyaring informasi global. Dengan demikian, internet dapat berfungsi optimal sebagai akselerator kualitas pendidikan, bukan sekadar pelengkap fasilitas.

Penguatan Jaringan Non Organik

Seiring dengan kemajuan era globalisasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, dunia pendidikan dituntut untuk cepat beradaptasi dan bersikap transformatif guna menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta proses pembelajaran yang lebih efektif. Namun, pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait pemerataan, mutu, efisiensi, dan relevansi pendidikan (Normina, 2016). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa salah satu kendala utama dalam kemajuan pendidikan adalah minimnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan.

Penelitian Pradhan (2008), yang dilakukan secara acak terhadap 520 sekolah di Jawa Tengah dari Januari 2007 hingga Oktober 2008, menunjukkan implikasi signifikan mengenai peran komite sekolah dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dalam konteks ini, Umu Mahben (2022) menegaskan bahwa: “Partisipasi masyarakat dalam pendidikan tidak hanya terbatas pada

kepentingan anaknya di sekolah, tetapi juga melibatkan tanggung jawab orang tua yang memiliki peran dominan dalam mempengaruhi kemajuan anak. Sebaliknya, sekolah membutuhkan masyarakat, bukan hanya anak-anak, untuk menyerap informasi tentang kemajuan dan kekurangan sekolah melalui penilaian masyarakat.” (Wawancara, 15 Desember 2022)

Relasi timbal balik antara sekolah dan masyarakat, yang dikenal sebagai Humas (hubungan masyarakat), merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh lembaga, baik kedinasan, swasta, lembaga sosial, maupun lembaga ekonomi komersial. Hal ini terjadi karena manusia, selain sebagai individu, juga merupakan makhluk sosial. Oleh sebab itu, hubungan yang inklusif dengan masyarakat sekitar sangat penting untuk menciptakan kondisi saling menguntungkan dan memudahkan kedua belah pihak.

Menurut M. Islam (2022), relasi yang harmonis dan saling menguatkan antara sekolah dan masyarakat perlu terus diperkuat melalui berbagai kegiatan sekolah, seperti kegiatan olahraga, yang dapat melibatkan masyarakat dan orang tua untuk menyaksikan peragaan anak-anak mereka. Pentingnya relasi timbal balik ini bagi sekolah antara lain adalah (a) meningkatkan motivasi untuk terus memperbaiki diri, (b) mempermudah perbaikan pendidikan, (c) meningkatkan kualitas pengajaran, (d) mendapatkan koreksi dari masyarakat, (e) memperoleh dukungan moral, (f) mempermudah sumbangsih masyarakat, dan (g) memperlancar jalannya pembelajaran. Di sisi lain, masyarakat juga memperoleh manfaat, seperti (1) mengetahui hal-hal mengenai sekolah dan inovasinya, (2) memudahkan pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat, (3) menyalurkan partisipasi dalam pendidikan, terutama bagi anak-anak mereka, dan (4) memberikan usulan untuk pengembangan pendidikan (Pidarta, 2020).

Wahyuni Dalu (2003) mengidentifikasi tiga jenis hubungan antara sekolah dan masyarakat, yaitu: a) hubungan edukatif, yakni kerja sama dalam mendidik antara guru dan orang tua di rumah; b) hubungan kultural, yaitu kerja sama yang memungkinkan saling membina dan mengembangkan kebudayaan

masyarakat tempat sekolah berada; dan c) hubungan institusional, yaitu kerja sama antara sekolah dan lembaga atau instansi resmi lainnya, baik swasta maupun pemerintah. Tujuan hubungan antara sekolah dan masyarakat adalah mengetahui pentingnya peran sekolah dalam masyarakat, memperoleh dukungan moral dan finansial untuk pengembangan sekolah, memberikan informasi tentang program sekolah kepada masyarakat, memperkaya dan memperluas program sekolah sesuai kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan kerja sama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak.

Menurut Zulkarnaen Nasution (2010), fungsi Humas dalam lembaga pendidikan adalah sebagai jembatan komunikasi antara sekolah dengan publik internal (dosen, guru, karyawan, mahasiswa/siswa) dan publik eksternal (orang tua, masyarakat, serta lembaga luar). Humas berperan penting dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dan mengantisipasi berbagai persoalan global atau isu negatif yang dapat merugikan lembaga pendidikan. Fungsi Humas ini menjadi bagian integral dari manajemen organisasi di institusi pendidikan, di mana komunikasi dua arah (timbang balik) antara lembaga pendidikan dan masyarakat memainkan peran kunci dalam menentukan keberhasilan visi dan misi lembaga (Rachmadi, 1994).

Ketika hubungan antara sekolah dan masyarakat terjalin dengan baik, manajemen sekolah menunjukkan sejumlah indikator keberhasilan. Sekolah mampu membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua serta melibatkan mereka dalam berbagai program pendidikan. Prosedur pelibatan orang tua dijalankan secara jelas dan berkesinambungan, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengunjungi sekolah dan mengamati proses pembelajaran. Tingkat partisipasi orang tua dalam pertemuan sekolah juga tinggi, disertai kerja sama yang solid dalam memantau tugas siswa. Selain itu, orang tua turut dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di sekolah, sementara guru menjaga komunikasi rutin mengenai perkembangan belajar

siswa. Keseluruhan indikator ini mencerminkan kualitas hubungan sekolah–masyarakat yang sehat dan produktif (Mulyasa dalam Fathurrahman, 2020).

Bentuk relasi yang dapat dijalankan antara sekolah dan masyarakat, menurut Wahyuni Dalu (2003), meliputi teknik tertulis, seperti laporan triwulanan atau tahunan; teknik lisan, seperti kunjungan rumah dan pertemuan orang tua; serta teknik peragaan, di mana masyarakat diundang untuk menyaksikan kegiatan atau peragaan yang diadakan di sekolah.

Catatan Akhir

Eksistensi pendidikan Islam di Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah demografi minoritas Muslim. Pertumbuhan signifikan madrasah dan pesantren menjadi bukti adaptabilitas lembaga pendidikan Islam dalam merespons tantangan geografis, keterbatasan ekonomi, dan defisit sumber daya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi sinergis antara investasi pemerintah dalam infrastruktur dan kontribusi militan tokoh agama serta organisasi masyarakat yang memperluas akses pendidikan hingga ke pelosok daerah.

Secara strategis, pengembangan pendidikan Islam di NTT bertumpu pada dua dimensi utama. *Pertama*, strategi internal yang menekankan transformasi manajerial melalui empat pilar: (1) pembangunan fisik yang berorientasi pada fungsi dan aksesibilitas; (2) pembangunan non-fisik yang membangun kultur akademik dan religius; (3) manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip keadilan; serta (4) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengembangan SDM menjadi kunci, di mana pendidik dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kemampuan riset, adaptabilitas budaya, serta integritas moral yang tinggi.

Kedua, strategi eksternal yang berfokus pada perluasan jejaring. Hal ini mencakup penguatan jaringan organik melalui adopsi teknologi informasi dan internet untuk modernisasi pembelajaran, serta penguatan jaringan non-organik melalui optimalisasi hubungan masyarakat (Humas). Relasi harmonis

antara sekolah, keluarga, dan pemerintah menjadi modal sosial vital untuk meningkatkan mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan. Sinergi antara pembenahan internal dan kolaborasi eksternal ini pada akhirnya tidak hanya meningkatkan kualitas akademis, tetapi juga memperkuat peran pendidikan Islam sebagai instrumen harmoni sosial di NTT.

Daftar Pustaka

- Abdul Rouf. (2023). Analisis manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan akreditasi di MA Darul Ihsan Kota Batam. *Jurnal Al-Idarah*, 2(1), 5.
- Adawiyah, R., & Jamaluddin, W. (2016). Rekayasa pendidikan agama Islam di daerah minoritas Muslim. *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 1(2), 120–130.
- Ahmad, & Hermawan. (2013). *E-business & e-commerce*. Andi.
- Arifin, A. (n.d.). Nuansa teosentris humanistik pendidikan Islam: Signifikansi pemikiran Hasan Langgulung dalam konstalasi reformasi pendidikan. *Lektur Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Seri VIII.
- Arifin, B. (2019). Strategi pengembangan lembaga pendidikan Islam di daerah minoritas Muslim dan kawasan elit. *Falasafa*, 10(2), 1.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktis*. PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu penelitian praktik*. Mahastya.
- Arvia, E., dkk. (2016). Penguatan manajemen lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) di Desa Garawangi dan Desa Rancaputat Kabupaten Majalengka. *Jurnal Penelitian*, 1(4), 235.
- Arwidayanto, dkk. (2017). *Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan*. Widya Padjadjaran.
- Aziz, M. (2017). Menejemen kurikulum dalam pengembangan budaya belajar di Madrasah Aliyah Mu'lilimin Univa Medan. *ITTIHAD*, 1(2), 199.

- CNBC Indonesia. (2022, September 21). *Mengenal apa itu internet: Sejarah, perkembangan, manfaatnya*.
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220921131159-37-373856/mengenal-apa-itu-internet-sejarahperkembanganmanfaatnya>
- Dalu, W. (2003). *Pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Daulay, H. P. (2019). *Pendidikan Islam di Indonesia: Histori dan eksistensinya*. Prenadamedia.
- Dja'afar, A. (2015). *Pendidikan Islam dan pengembangan SDM*. Jakarta: Pustaka Al-Hidayah.
- Djafaar, T. Z. (2001). *Pendidikan non formal dan peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan*. Penerbit FIP UNP.
- Fathurrahman, dkk. (2020). Relasi sekolah dengan masyarakat dan tantangan global. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 52-53.
- Fitri, R., & Ondeng, S. (2022). Pesantren di Indonesia: Lembaga pembentukan karakter. *Jurnal Al Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 52–53.
- Gunawan, A. H. (2016). *Administrasi sekolah: Administrasi pendidikan mikro*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamruni. (2015). *Kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Idris, M. (2015). *Tradisi gotong royong di Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Pustaka Alam.
- Irawanda, G., dkk. (2020). Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat di SMK Negeri Makassar. *Jurnal Administrasi Kebijakan dan Kepemimpinan Pendidikan*, 25, 20-30.
- Kadir, I. (2017). *Pelecehan seksual oleh guru: Kasus dan dampaknya*. Jakarta: Media Sosial Press.
- Kamaria, N. (2008). Konsep manajemen keuangan pendidikan. *Al-Afkar*, 6(1), 70.

- Langgulong, H. (2004). *Manusia dan pendidikan: Suatu analisa psikologis, filsafat dan pendidikan*. Pustaka al Husna Baru.
- Langgulong, H. (2013). *Pendidikan Islam: Pembentukan pribadi anak didik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahben, U. (2022). Wawancara di Solor Timur, tanggal 15 Desember 2022.
- Makbuloh, D. (2012). Kultur minoritas dalam perspektif pendidikan Islam. *Analisis*, 12(1), 13.
- Mesiono, dkk. (2020). *Manajemen dalam perspektif ayat-ayat Al-Qur'an*. Persada Publishing.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2005). *Menjadi kepala sekolah profesional*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Kompetensi pendidik dan kependidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2020). *Manajemen pendidikan berbasis sekolah*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Najihan, I., dkk. (2021). Konsep manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan Islam perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Idaraah*, 5, 226.
- Nasution, Z. (2010). *Manajemen humas di lembaga pendidikan: Konsep, fenomena dan aplikasi*. UMM Press.
- Nasution, Z. (2010). *Manajemen Humas di lembaga pendidikan: Konsep, fenomena dan aplikasi*. Malang: UMM Press.
- Normina. (2016). Partisipasi masyarakat dalam pendidikan. *Ittihad Jurnal Kopertis Wilayah XI Kalimantan*, 71–85.
- Pidarta, E. (2020). *Pengelolaan pendidikan untuk peningkatan kualitas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pradhan, M., dkk. (2008). *Improving education quality through enhancing community participation: Results from randomized field experiment in Indonesia*. Wharton Open Edu.

- Pradhan, M., dkk. (2008). Improving education quality through enhancing community participation: Results from randomized field experiment in Indonesia. *Wharton Open Edu*.
- Rachmadi, A. (1994). *Public relation dalam teori dan praktik*. Jakarta: PT Grafindo Pustaka.
- Rachmawati, N., Siraj, N., & Bharoto, R. M. H. (2018). Implementasi perencanaan partisipatif dalam pembangunan fisik di Desa Suci Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. *Jurnal Publika*, 6(2), 131.
- Rahma, N. (2020). *Peningkatan literasi guru di era digital*. Yogyakarta: Literasi Nusantara.
- Rosyandi, dkk. (2015). Peran kepala sekolah sebagai manajer dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP 1 Cilawu. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 3(1), 126.
<https://doi.org/10.21831/amp.v3i1.6276>
- Sa'adiyah, H. (2018). Manajemen mutu pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia. *Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(2), 184. <https://doi.org/10.36835/bidayatuna.v1i2.3329>
- Sanjana, W. (2018). Implementasi kurikulum berbasis kompetensi dalam pendidikan. *Akhyak*, 2(3), 45-56.
- Sanjana. (2018). Kepemimpinan demokratis kepala sekolah. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 7(1), 184.
<https://doi.org/10.37755/jsp.v7i1.131>
- Sibero. (2014). *Web programming power pack*. Mediakom.
- Sinta, E. M. (2019). Manajemen sarana dan prasarana. *Jurnal Islamic Education Manajemen*, 4(1), 89.
- Somarsono, S. (2014). *Sumber Daya Manusia: Pengertian dan penerapannya dalam produksi*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian pendidikan (Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D)*. CV Alfabeta.
- Sulistiyorini, S. (2006). *Manajemen pendidikan Islam*. Elkaf.

- Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi manajemen sumber daya manusia dan ketenagakerjaan*. Graha Ilmu.
- Syah, M. (2004). *Psikologi pendidikan: Dengan pendekatan baru*. PT Remaja Rosdakarya.
- Syah, M. (2016). *Kompetensi psikologis pendidik dalam pendidikan*. Jakarta: Alfabeta.
- Syarif, M. Z. H. (2021). *Dinamika pendidikan Islam minoritas (Eksistensi, kontestasi dan konvergensi lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah di Nusa Tenggara Timur)* [Disertasi]. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Tule, P., dkk. (2015). *Identitas Islam pribumi*. Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UNESCO. (2000). *The four pillars of education for the 21st century*. Paris: UNESCO.
- Usman, U. (1992). *Menjadi guru profesional*. Remaja Rosdakarya.
- Usman, U. (2014). *Kompetensi pendidik di abad 21*. Bandung: Alfabeta.
- Zulfitria, et al. (2020). Penggunaan teknologi dan internet sebagai media pembelajaran di masa pandemi covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 75–77.
- Zulkarnain, M. (2010). *Manajemen Humas di lembaga pendidikan*. Malang: UMM Press.